



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realitas pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

b. Manajemen

Membantu pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.



Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyajikan/menyediakan informasi yang bermanfaat tentang :

- a. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah sumber daya ekonomi, alokasi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- d. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, asset, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) pendapatan
- b) belanja
- c) transfer
- d) surplus/defisit
- e) pembiayaan
- f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan kewajiban yang



mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) kas dan setara kas
- b) investasi jangka pendek
- c) piutang pajak dan bukan pajak
- d) persediaan
- e) investasi jangka panjang
- f) asset tetap
- g) kewajiban jangka pendek
- h) kewajiban jangka panjang
- i) ekuitas dana

Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas

Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Operasional pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir dari Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari :

- a. Pendapatan
- b. Beban Operasi meliputi :
 - Beban Pegawai
 - Beban Barang dan Jasa
 - Beban Penyusutan
 - Beban Lain – Lain
 - Surplus/Defisit LO

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan nya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemerian
- e. ksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- f. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018, tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

Bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun pelaporan keuangan dalam format yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan Laporan Keuangan lainnya yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional serta Laporan Perubahan Ekuitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



1.1. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD.



Bab 5 Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

5.2 Penjelasan Pos - Pos Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas Dana

5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penutup

Lampiran Tambahan



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada triwulan III 2019 sebesar Rp 351,48 triliun, atau mencatatkan pertumbuhan 5,66 persen (yoy). Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2019 yang tercatat sebesar 5,56 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terjadi pada semua komponen, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Kelompok lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 7,51 % (yoy). Selain komponen Pengeluaran Kelompok LNPRT, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh terbesar kedua yaitu sebesar 6,23 persen (yoy). Pertumbuhan terbesar ketiga yakni komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,49 persen (yoy).

Konsumsi Rumah Tangga sebagai komponen terbesar dalam PDRB pengeluaran, pertumbuhannya melambat menjadi 4,18 persen (yoy) dari triwulan II 2019 yang mencapai 5,16 persen (yoy). Pertumbuhan yang melambat juga terjadi pada Ekspor Jawa Tengah yang tumbuh sebesar 5,43 persen (yoy), menurun dibandingkan pertumbuhan periode sebelumnya sebesar 5,93 persen (yoy). (sumber : <https://jateng.tribunnews.com/2019/11/24/pertumbuhan-ekonomi-jawa-tengah-triwulan-iii-2019-meningkat-566-persen>.)

2.3. Kebijakan Keuangan

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan untuk “Meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Dinamika perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat Undang-Undang menuntut perubahan Organisasi di Lingkungan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk diantaranya adalah pembentukan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Provinsi Jawa Tengah. DISPORAPAR merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantuan dalam rangka mewujudkan kepemudaan olahraga dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan keuangan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat dituangkan dalam program kerja tahun 2019, sebagai berikut :



1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Program Penyadaran Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Lembaga
4. Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
5. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan / Organisasi Olahraga
6. Program Pembibitan, Pembinaan, dan Pemasyarakatan Olahraga
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
8. Program Pembibitan, Pembinaan, dan Pemasyarakatan Olahraga
9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
11. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

**Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
Tahun Anggaran 2019**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.13
Sub Fungsi : 2.13.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
				Fisik (%)	Keu (%)	
		Rp	Rp			
2.13.01.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (Sekretraiat)	14.557.720.000	17.176.843.427		84,66	
2.13.01.01.0001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	4.005.070.000	3.582.819.300		89,46	belanja honor pengadaan barang/jasa serta pengelola keuangan, jasa foraider disesuaikan dengan kebutuhan
2.13.01.01.0002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	74.000.000	26.434.500		35,72	Sesuai dengan kebutuhan
2.13.01.01.0003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	2.221.000.000	1.339.669.958		60,32	sesuai dengan kebutuhan dinas dan efisiensi
2.13.01.01.0004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	325.000.000	264.906.975		81,51	sisa negosiasi
2.13.01.01.0005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	2.969.000.000	2.933.735.050		98,81	
2.13.01.01.0006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	1.780.000.000	1.417.547.335		79,64	sesuai dengan kebutuhan dinas
2.13.01.01.0007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	380.850.000	290.194.050		76,20	sesuai dengan kebutuhan dinas
2.13.01.01.0008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	67.800.000	16.945.000		24,99	sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi
2.13.01.01.0009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.980.000.000	1.615.469.112		81,59	sesuai dengan kebutuhan
2.13.01.01.0010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	755.000.000	511.247.777		67,71	Sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan



Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.13.01.01.0011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.493.920.000	4.192.923.041		93,30	
2.13.01.01.0014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	248.000.000	246.260.700		99,30	
2.13.01.01.0015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	785.080.000	539.692.817		68,74	sesuai dengan kebutuhan
2.13.01.01.0020	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	205.000.000	198.997.812		97,07	
2.13.01.0007.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (PPLOP)	10.047.000.000	7.570.930.567		75,36	
2.13.01.0007.01.0002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	17.000.000	3.964.200		23,32	Sesuai dengan kebutuhan
2.13.01.0007.01.0003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	819.000.000	531.339.812		64,88	sesuai dengan kebutuhan, masih ada pembangunan di kompleks Jatidiri sehingga biaya listrik ditanggung pemborong
2.13.01.0007.01.0004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	75.000.000	74.996.000		99,99	
2.13.01.0007.01.0005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	800.000.000	770.000.000		96,25	
2.13.01.0007.01.0006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	220.000.000	65.652.905		29,84	sesuai dengan kebutuhan
2.13.01.0007.01.0007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	46.000.000	8.237.500		17,91	sesuai dengan kebutuhan
2.13.01.0007.01.0008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	75.000.000	8.880.000		11,84	sesuai dengan kebutuhan, Belanja Modal aset tetap lainnya pengadaan buku ilmu pengetahuan umum tidak terserap Rp 64,800,000 karena sudah ada bantuan peminjaman buku dari SMA 11 Semarang
2.13.01.0007.01.0009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	635.000.000	325.330.000		51,23	Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan 90,000,000di karena pindah kantor, rp 162,820,000 karena pemeliharaan water treatment kolam jatidiri pada bulan agustus adanya pembangunan kolam jatidiri sampai bulan desember,Belanja Pemeliharaan jaringan tidak terserap sebesar Rp 56,750,000 karena pindah kantor
2.13.01.0007.01.0010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	110.000.000	34.370.000		31,25	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak terserap Rp 75,630,000 karena pindah kantor dan tidak menggunakan genzet
2.13.01.0007.01.0011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.000.000.000	5.699.621.700		81,42	Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan gedung tempat olahrag renovasi lapangan panahan (tembok pengaman belakang, talud dan pagar pengaman, kamar mandi dan pavingisasi, kanopi) tidak trserap sebesar rp 982,818,300 karena masih ada penataan kawasan jatidiri
2.13.01.0007.01.0015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	160.000.000	5.250.000		3,28	Belanja bimbingan teknis tidak terserap sebesar 154,750,000 karena tidak terlaksanakannya penyelenggaraan pelatihan tingkat dasar pelatih
2.13.01.0007.01.0020	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	90.000.000	43.288.450		48,10	Belanja atk rp 12,680,500 ,Belanja dekorasi rp 6,000,000 ,belanja jasa Publikasi rp 9,000,000 tdk terserap karena sudah di anggarkan di kegiatan,Belanja cetak dan Belanja penggandaan sesuai dengan kebutuhan



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.13
Sub Fungsi : 2.13.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.13.01.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.950.000.000	1.737.023.133		89,08%	
2.13.01.02.0001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000.000	1.273.768.548	100%	90,98%	sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi barang/jasa serta sisa negosiasi
2.13.01.02.0002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000.000	463.254.585	100%	84,23%	sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi barang/jasa serta sisa negosiasi

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.13
Sub Fungsi : 2.13.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.13.01.0001.15	Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Lembaga Kepemudaan	12.498.250.000	11.732.301.700		93,87%	
2.13.01.0001.15.0001	Peningkatan Karakter dan Nasionalisme Pemuda	5.498.250.000	4.807.251.700		87,43%	Efisiensi Perjalanan dinas
2.13.01.0001.15.0002	Pengembangan Pola Kemitraan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	1.500.000.000	1.476.826.000		98,46%	
2.13.01.0001.15.0003	Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	5.500.000.000	5.448.224.000		99,06%	

Program pemberdayaan, pengembangan pemuda dan lembaga kepemudaan kegiatan pengembangan pola kemitraan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: 1) pelatihan kepemimpinan di Kabupaten Semarang dengan jumlah peserta sebanyak 110 orang, 2) pemilihan organisasi kepemudaan tingkat Jateng / lomba organisasi kepemudaan berprestasi di kota Semarang, dengan peserta dari 35 kabupaten / kota se Jawa Tengah dengan pemenang organisasi kepemudaan dari Kabupaten Pekalongan, 3) Pelatihan peningkatan manajemen organisasi pelajar mahasiswa dan kepemudaan di Kabupaten Semarang, dengan peserta sebanyak 110 orang, 4) pelatihan membangkitkan sikap peduli lingkungan (kegotongroyongan) bagi organisasi kepemudaan di Kabupaten Rembang



dengan jumlah peserta 110 orang, 5) Rakor kemitraan dan kelembagaan pemuda di Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah peserta 150 orang, 6) Rakor informasi kepemudaan di kota Surakarta dengan jumlah peserta 100 orang, 7) sub kegiatan rule model pengembangan kepemudaan dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang.

Program pemberdayaan, pengembangan pemuda dan lembaga kepemudaan, kegiatan pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan : 1) Wawasan kebangsaan dan bela negara dilaksanakan pada bulan Februari s/d Desember 2019 sebanyak 106 kegiatan dengan peserta 10.600 orang di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, 2) pelaksanaan lomba TUB-BB tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang pada bulan April 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 126 orang, 3) pelaksanaan seleksi Paskibraka pada bulan Mei 2019 di Kota Semarang dengan jumlah peserta 70 orang, 4) pemantapan Paskibraka pada bulan Agustus 2019 di Kota Semarang dengan jumlah peserta 37 orang, 5) Penanggulangan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS pada bulan Juli dan November 2019 di Kota Semarang dan Kabupaten Pekalongan sebanyak 3 kegiatan dengan jumlah peserta 600 orang, 6) Peringatan hari Sumpah Pemuda ke 92 tingkat Provinsi Jawa Tengah pada bulan Oktober 2019 di Kabupaten Boyolali dengan jumlah peserta sebanyak 525 orang, 7) kegiatan kepercitaalamannya pada Bulan Oktober 2019 di Kabupaten Kendal dengan jumlah peserta sebanyak 105 orang, 8) seleksi pertukaran pemuda antar negara (PPAN) (Maret 2019) di Kota Semarang dengan jumlah peserta 70 orang, Jawa Tengah mendapat kuota : *Australia Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP)* – 1 orang putri, *Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP)* - 1 orang putra, *Indonesia-Korea Youth Exchange Program (IKYEP)* – 1 orang putra, *Singapura – Indonesia Youth Leadership Exchange Program (SIYLEP)* – 1 orang putri. 9) Seleksi Calon Pemuda Kapal Pemuda Nusantara pada bulan September 2019 di Kota Semarang dengan jumlah peserta 70 orang, 10) Seleksi Pemuda Pelopor pada bulan September 2019 sebanyak 70 orang di Kota Semarang, 11) Studi Komparasi Pemantapan Paskibraka pada bulan November 2019 di Pemprov DKI Jakarta dengan jumlah peserta 18 orang, 12) melaksanakan peningkatan karakter dan jiwa kepemimpinan pemuda bulan Desember 2019 di Kabupaten Wonosobo dengan peserta sebanyak 60 orang.



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Fungsi : 2.13

Sub Fungsi : 2.13.01

Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.13.01.0001.16	Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup	1.250.000.000	1.229.501.000		98,36%	
2.13.01.0001.16.0001	Peningkatan/ Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster	1.250.000.000	1.229.501.000		98,36%	

Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Kegiatan Peningkatan / Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa pelatihan yaitu pelatihan bidang kuliner pembuatan kue, pelatihan bidang membatik, pelatihan bidang menjahit kain perca dengan jumlah peserta di setiap pelatihan sebanyak 100 peserta.

Kegiatan Peningkatan / Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster juga memberikan bantuan sosial dalam bentuk barang kepada peserta pelatihan. Berdasarkan SK Gubernur No. 460/101 tahun 2019, bantuan sosial pelatihan bidang kuliner pembuatan kue diberikan kepada 20 KWP di Jawa Tengah (SK Gubernur dan daftar nama penerima terlampir). Bantuan sosial kepada peserta pelatihan pembuatan kue sebesar Rp 115.340.000,00 berupa peralatan : tabung gas 3 kg, kompor gas 2 tungku, oven dan peralatan memasak. Selain diberikan peralatan, peserta juga diberikan bahan berupa minyak goreng, tepung, gula pasir, metega, penyedap rasa dll.

Berdasarkan SK Gubernur No. 460/102 tahun 2019, bantuan sosial pelatihan bidang membatik diberikan kepada 20 KWP di Jawa Tengah (SK Gubernur dan daftar nama penerima terlampir). Bantuan sosial kepada peserta pelatihan membatik sebesar Rp 140.000.000,00 berupa peralatan : canting tembaga, kompor minyak, wajan, cetakan batik. Selain diberikan peralatan, peserta juga diberikan bahan berupa lilin, kain, pewarna tekstil, sabun cuci, pewangi pakaian, dll.

Berdasarkan SK Gubernur No. 460/103 tahun 2019, bantuan sosial pelatihan bidang menjahit kain perca diberikan kepada 20 KWP di Jawa Tengah (SK Gubernur dan daftar nama penerima terlampir). Bantuan sosial kepada peserta pelatihan menjahit kain perca sebesar Rp 136.200.000,00 berupa peralatan : mesin jahit dan limbah kain. Selain diberikan peralatan, peserta juga diberikan bahan berupa benang jahit, jarum jahit, pita ukuran, marker, dan gunting kain.



Berdasarkan SK Gubernur No. 460/104 tahun 2019, bantuan sosial pelatihan bidang bengkel diberikan kepada 20 KWP di Jawa Tengah (SK Gubernur dan daftar nama penerima terlampir). Bantuan sosial kepada peserta pelatihan bidang bengkel sebesar Rp 147.860.000,00 berupa peralatan : kompresor, kunci pas 1 set (kunci pass, kunci T, kunci L, kunci inggris).

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Fungsi : 2.13
Sub Fungsi : 2.13.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 95 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.13.01.0002.17	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga	3.585.000.000	3.452.612.900	100%	96,31%	
2.13.01.0002.17.0001	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK serta Industri Olahraga	1.000.000.000	976.069.000	100%	97,61%	
2.13.01.0002.17.0002	Peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga	2.585.000.000	2.476.543.900		95,80%	

Program pengembangan kapasitas kelembagaan / organisasi olahraga kegiatan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK serta industri olahraga pada tahun 2019 telah melaksanakan pelatihan event organizer dengan peserta sebanyak 70 orang, 2) pelatihan pembuatan alat pendukung event organizer olahraga dengan peserta sebanyak 70 orang, 3) pembelian 1 alat treadmill yang berfungsi untuk mengukur kebugaran atlet.

Program pengembangan kapasitas kelembagaan / organisasi olahraga kegiatan peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahragapada tahun 2019 telah melaksanakan 1) Bintek peningkatan SDM pengelola Organisasi Olahraga di Semarang, jumlah peserta 100 orang, 2) Standarisasi dan akreditasi kelembagaan olahraga dengan jumlah peserta 50 orang, 3) Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan di masyarakat sebanyak 40 kejuaraan, 4) Pengiriman kontingen PORNAS KORPRI Jawa Tengah di Provinsi Bangka Belitung sebanyak 115 orang, 5) Peningkatan kualitas atlet melalui PPLM di Semarang sebanyak 10 orang.



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.13
Sub Fungsi : 2.13.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.13.01.0002.18	Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	60.371.000.000	44.613.519.855		73,90%	
2.13.01.0002.18.0001	Peningkatan Kualitas SDM Olahraga	1.829.000.000	1.744.005.000		95,35%	
2.13.01.0002.18.0002	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi	7.805.675.000	7.028.624.960		90,05%	Penundaan Pertandingan Asean Paragames di Bulan Maret 2019 karena Filipina sbg tuan rumah blm siap sehingga belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas tidak terserap
2.13.01.0002.18.0003	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pendidikan	34.516.000.000	22.599.656.260		65,48%	sub kegiatan fasilitasi klub olahraga unggulan untuk mengikuti tryout provinsi, nasional, dan internasional, banyak klub olahraga unggulan yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan fasilitasi tersebut. Bantuan berupa perjalanan dinas.
2.13.01.0002.18.0004	Pembinaan Olahraga Potensial Jangka Panjang, Klub Olahraga dan Penetapan Olahraga Unggulan Daerah	6.400.000.000	3.648.692.465		57,01%	sub kegiatan fasilitasi klub olahraga unggulan untuk mengikuti tryout provinsi, nasional, dan internasional, banyak klub olahraga unggulan yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan fasilitasi tersebut. Bantuan berupa perjalanan dinas.
2.13.01.0002.18.0006	Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga	8.055.000.000	7.885.275.170		97,89%	
2.13.01.0002.18.0007	Pengembangan Pola Kemitraan dan Informasi Keolahragaan	1.765.325.000	1.707.266.000		96,71%	
2.13.01.0007.18.0005	Peningkatan Prestasi Atlet Pelajar Melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP)	17.300.000.000	14.696.220.899		84,95%	Efisiensi dan sisa lelang

Program pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga kegiatan peningkatan kualitas SDM Olahraga pada tahun 2019 telah melaksanakan : 1) Pelatihan Pelatih angkatan I (cabang olahraga judo, soft tenis, tarung derajat, sepatu roda) peserta 80 orang, 2) Pelatihan Pelatih angkatan II (cabang olahraga voli indoor, voli pasir, tonis dan judo) peserta 80 orang, 3) Pelatihan Peningkatan pengetahuan tenaga keolahragaan peserta 100 orang, 4) Pelatihan pelatih SKJ (senam) peserta sebanyak 70 orang, 5) Pelatihan pelatih tingkat dasar NPC di



Surakarta dengan jumlah peserta 100 orang, 6) pelatihan pelatih tingkat lanjut NPC di Surakarta dengan jumlah peserta 100 orang, 7) Pelatihan klasifikasi kecacatan cabor dan penanganan cedera olahraga NPC di Surakarta dengan jumlah peserta 100 orang, 8) Pelatihan pelatih cabor Drumband di Semarang dengan jumlah peserta 35 orang.

Program pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga kegiatan Penyelenggaraan olahraga kompetisi olahraga prestasi ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 1) Kejurprov NPC dengan jumlah peserta 359 orang dari 35 kabupaten/kota, 2) Peningkatan Kinerja NPC

Program pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga pendidikan ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 1) penyelenggaraan POPDA SD/MI sederajat dengan jumlah peserta 1.750 orang dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah jumlah cabang olah raga yang ditandingkan sebanyak 13 cabang olah raga, 2) penyelenggaraan POPDA SMP/MTs sederajat dengan jumlah peserta sebanyak 2.000 orang dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah jumlah cabang olah raga yang ditandingkan sebanyak 17 cabang olahraga, 3) penyelenggaraan POPDA SMA/MA sederajat dengan jumlah peserta sebanyak 2.500 orang dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah jumlah cabang olah raga yang ditandingkan sebanyak 21 cabang olahraga, 4) penyelenggaraan POSPEDA dengan jumlah peserta sebanyak 1.200 orang dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah jumlah cabang olah raga yang ditandingkan sebanyak 8 cabang olahraga, 5) ikut serta dalam POSPENAS dengan jumlah peserta sebanyak 104 orang jumlah cabang olah raga yang diikuti sebanyak 4 cabang olahraga, 6) menyelenggarakan ASG (Asian School Games) dengan jumlah peserta sebanyak 2.000 orang dari 10 negara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 11 cabang olahraga, 7) mengikuti POPNAS dengan jumlah peserta 340 orang cabang olah raga yang diikuti sebanyak 17 cabang olahraga, 8) mengikuti POMNAS dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang cabang olahraga yang diikuti sebanyak 17 cabang olahraga, 9) mengikuti PEPARPENAS dengan jumlah peserta 40 orang, cabang olahraga yang diikuti sebanyak 9 cabang olahraga, 10) menyelenggarakan KEJURDA sepakbola U12 dengan jumlah peserta 250 orang dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, 11) KEJURDA sepakbola U14 dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, 12) menyelenggarakan KEJURDA sepakbola U16 dengan jumlah peserta 400 orang dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, 13) menyelenggarakan KEJURDA sepakbola mahasiswa dengan jumlah peserta sebanyak 400 orang dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Program pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga kegiatan Pembinaan Olahraga Potensial Jangka Panjang, Klub Olahraga dan Penetapan Olahraga Unggulan Daerah telah melaksanakan 1) Pembinaan Sentra Olahraga Potensial Jangka Panjang dengan jumlah peserta 150 orang dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 33 cabang olahraga



, 2) penyelenggaraan Choaching Clinic dengan jumlah peserta sebanyak 378 orang 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 17 cabang olahraga, 3) Klub Olahraga Unggulan

Program pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga, pada tahun 2019 telah melaksanakan : 1) Rally Wisata di kabupaten Karanganyar, bukit sakura, Kebun Teh Kemuning, Museum Sangiran finish di Lor Inn Syariah. 2) Penyelenggaraan Haornas tk Provinsi di Kabupaten Wonosobo dengan peserta sebanyak 5.000 orang, 3) Tenis piala Gubernur di Kota Pekalongan dengan jumlah peserta sebanyak 240 orang, 4) Tenis piala Kadisporapar Prov Jateng di Kota Surakarta dengan jumlah peserta sebanyak 220 orang, 5) Forda olahraga masyarakat di Kabupaten Wonogiri diikuti oleh 900 peserta, 6) Jambore Olahraga Masyarakat di Kota Semarang diikuti oleh 1.000 peserta, 7) Gerak jalan 28 K di Kabupaten Boyolali diikuti oleh 296 orang, 8) Perhelatan Borobudur Marathon di Magelang dengan jumlah peserta 1.000 peserta, 9) Gowes Jawa Tengah di Kabupaten Wonogiri dengan jumlah peserta 1.500 orang, 10) Pengiriman kontingen SOINA di Abu Dhabi dalam rangka Special Olympic World Games (SOWSG) XV para atlet penyandang cacat intelektual sebanyak 5 orang, pengiriman kontingen SOINA ke India dalam rangka SOINA Special Asia Pasific 2019 sebanyak 10 orang patlet penyandang tuna grahita, pengiriman kontingen SOINA ke Thailand dalam rangka *1st Special Olympics Asia Pasific Unified Badminton Championship* di Bangkok, Thailand sebanyak 10 orang, pengiriman kontingen SOINA ke Singapura dalam rangka Turnamen Sepak Bola Olimpiade Khusus ke-8 Asia Tenggara sebanyak 10 orang

Program pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga kegiatan pola kemitraan dan informasi keolahragaan pada tahun 2019 telah melaksanakan :

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Fungsi : 2.13
Sub Fungsi : 2.13.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 95 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.13.01.0003.15	Pengembangan Destinasi Pariwisata	25.836.943.000	24.708.413.270	100%	95,63%	
2.13.01.0003.15.0001	Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata	14.421.943.000	14.186.825.233	100%	98,37%	
2.13.01.0003.15.0002	Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata	8.065.000.000	7.537.167.138	100%	93,46%	
2.13.01.0003.15.0003	Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata	1.050.000.000	960.929.999	100%	91,52%	
2.13.01.0003.15.0005	Kegiatan Pengembangan dan Pengelola Aset Pariwisata Milik Pemrov	500.000.000	426.265.500	100%	85,25%	
2.13.01.0005.15.0004	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pariwisata	1.800.000.000	1.597.225.400		88,73%	



Program pengembangan destinasi wisata kegiatan pengembangan kawasan pariwisata pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : 1) Workshop peningkatan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata di Kabupaten Grobogan, Pati, Rembang, dan Blora dengan jumlah peserta 10.500 orang, 2) Fasilitasi forum pengembangan destinasi pariwisata di kabupaten/kota (kawasan) dan wilayah KSPN melalui event bersama sebanyak 7 event di Kabupaten Kudus, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, 3) Revitalisasi DTW Rowo Jombor dan Karimunjawa berupa pembangunan plaza dan jogging track di DTW Rowo Jombor, dan pembuatan landmark dan penataan jogging track di Karimunjawa, 4) Penataan aset pariwisata milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di Goa Sepalawan Purworejo berupa penataan taman dan gardu pandang dan di Karimunjawa berupa penataan TIC, 5) pengembangan pariwisata lintas sektoral melalui FGD wilayah KSPN di Solo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, Kota Semarang dengan peserta sebanyak 200 orang, 6) Penataan DTW Kawasan Dieng (DTW Sikunir dan Telaga Merdada), berupa pembuatan railing tangga di Sikunir dan penataan taman di Telaga Merdada, 7) Pengembangan Infrastruktur dan ekosistem kawasan pariwisata berupa studi LARAP di Karimunjawa dan Dieng, 8) Penguatan kawasan wisata KSPN melalui pengembangan produk atraksi wisata non fisi di KSPN Karimunjawa dan KSPN Dieng dengan jumlah peserta 300 orang, 9) Pemberian penghargaan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen dengan 12 kategori penghargaan kepariwisataan jumlah peserta 130 orang, 10) Penguatan potensi keunikan lokal melalui atraksi wisata dan aksi di destinasi pariwisata di Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Kebumen, Kab. Semarang, Kota Semarang, Kab. Magelang.

Program pengembangan destinasi wisata kegiatan pengembangan daya tarik wisata pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : 1) penyusunan profil desa wisata di Kota Semarang, Salatiga, dan Kabupaten Semarang, dengan peserta dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. 2) Pengembangan destinasi wisata pada bulan Februari di Kabupaten Klaten, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pemalang dengan jumlah peserta 50 orang dari desa wisata Kabupaten dan Kota Surakarta, 50 orang dari desa wisata Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, 50 orang dari desa wisata di Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan. Pada bulan Maret di Kabupaten di Kabupaten Karangayar dan Kabupaten Cilacap dengan jumlah peserta 50 orang dari desa wisata Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, 50 orang dari Kabupaten Cilacap. 3) Workshop desa wisata di Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan dengan total peserta 400 orang dari desa wisata. 4) Gelar desa wisata di kota Semarang dihadiri perwakilan desa wisata dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. 5) Temu mitra di Madiun dan Malang dengan peserta sebanyak 40 orang. 5) Pengembangan daya tarik wisata di Wonosobo (2 kegiatan) dan di Banyumas (1 kegiatan) dengan jumlah peserta 100 orang dari Desa Deroduwur, Desa Sukatah, Desa Sukorejo dan Desa Candirejo Wonosobo, serta 50 orang dari Desa Karangtengah, Desa Baturaden Banyumas. 6) pengembangan daya tarik wisata di Desa



Deroduwur Kabupaten Wonosobo dengan jumlah peserta 25 orang. 7) Sosialisasi perda dan FGD penyusunan pergub di Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Pekalongan masing-masing 140 orang peserta. 8) Penguatan keunikan lokal menjadi atraksi wisata : Festival hadroh di Kabupaten Banyumas, Lomba memancing di destinasi wisata Lembah Kalipancur Semarang, Festival Rebana di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Klaten, Festival kesenian kuda lumping di Destinasi Wisata di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung, Festival tari ndolalak di Kabupaten Purworejo, dukungan penguatan keunikan lokal menjadi atraksi wisata (wayang) di Kabupaten Pati, Tari Topeng Ireng di destinasi wisata di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo, Lomba burung merpati di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Lomba burung berkicau di Kudus, Kota Semarang, Taman Balaikambang, Temanggung dan Kabupaten Magelang.

Program pengembangan destinasi wisata kegiatan pengembangan industri pariwisata pada tahun 2019 telah mengadakan beberapa kegiatan yaitu : 1) pembinaan 8 usaha Pariwisata di Jawa Tengah : usaha akomodasi pariwisata di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Sragen, usaha biro perjalanan wisata (BPW) di kabupaten Pati, usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi di Kabupaten Grobogan, usaha MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) di Kota Surakarta, usaha spa di Kabupaten Boyolali, usaha wisata tirta di Kabupaten Cilacap, usaha penyediaan makanan dan minuman di Kota Magelang, Usaha daya tarik wisata di Kabupaten Kendal. 2) Penyusunan paket wisata religi di Jawa Tengah destinasi pariwisata prioritas (DPP) Pekalongan, DPP Borobudur, DPP Semarang, DPP Blora, DPP Solo, DPP Cilacap, sehingga tersusunnya paket wisata religi di 6 DPP Provinsi Jawa Tengah dan tercetaknya 200 buku paket wisata religi. 3) Pengawasan sertifikasi usaha pariwisata di Jawa Tengah sebanyak 140 usaha pariwisata di 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. 4) Digitalisasi industri pariwisata di Jawa Tengah di Kota Semarang dengan tema aplikasi web based dan android dengan peserta 13 usaha pariwisata. 5) Pendampingan desa binaa di desa Deroduwur kabupaten Wonosobo dengan hasil terbentuknya 25 homestay di Desa Deroduwur.

Program pengembangan destinasi wisata kegiatan pengembangan dan pengelola aset pemerintah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: pembinaan pengelola aset hotel milik provinsi Jawa Tengah, penyusunan kajian pengembangan aset, live in di hotel milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara.

Program pengembangan destinasi wisata kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pariwisata pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : 1) pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat di sekitar DTW berupa pembinaan kewirausahaan di Desa Deroduwur Kabupaten Wonosobo peserta 40 orang, di Jatipohon Kabupaten Grobogan peserta 70 orang, di Pereng Kabupaten Klaten peserta 70 orang, di Kabupaten Kendal peserta 70 orang di Kabupaten Semarang peserta 70 orang. Ada beberapa pelatihan



yang dilaksanakan yaitu : pelatihan kewirausahaan kerajinan bambu di desa Deroduwur Kabupaten Wonosobo, pelatihan kewirausahaan kerajinan turunan batik di Kota Semarang, pelatihan kewirausahaan digital marketing di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Klaten, pelatihan kewirausahaan kerajinan kayu di Kabupaten Kudus. 2) Workshop pencegahan HIV dan AIDS di Kabupaten Jepara peserta 50 orang, 3) Live in desa wisata dalam rangka menindaklanjuti penyelenggaraan pemberdayaan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah dan sarasehan Ikatan Mas dan Mbak Jawa tengah untuk merumuskan program/kegiatan kedepan peserta 40 orang. 4) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pariwisata kegiatan berupa BinteK peningkatan kapasitas SDM pariwisata di Kabupaten Batang, Yogyakarta, Rawa pening Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak masing-masing kegiatan peserta berjumlah 40 orang, Temu mitra dan studi komparasi di Desa Adat Lebak Banten dengan jumlah peserta 40 orang, temu mitra dan orientasi kinerja di Malang Jawa Timur di Desa Wisata Pujon Kidul peserta 40 orang. 5) Aktualisasi Sapta Pesona dan Sadar Wisata berupa wisata lansia di Kabupaten Rembang, jumlah peserta 30 orang, sarasehan tanker peserta 80 orang di Kabupaten Temanggung dan diklat tanker peserta 30 orang di Kabupaten Banyumas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.13
Sub Fungsi : 2.13.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.13.01.0003.19	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Keolahragaan	362.304.030.000	354.044.392.275		97,72%	
2.13.01.0003.19.0002	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan	362.304.030.000	354.044.392.275		97,72%	

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : 1) Renovasi Stadion Jatidiri, 2) Pembayaran retensi pada pekerjaan Renovasi Stadion Jatidiri TA 2018, 3) Penyusunan Review DED Stadion Jatidiri Final, 4) Manajemen Konstruksi Stadion Jatidiri, 5) Mekanikal Elektrikal Stadion Jatidiri, 6) Renovasi GOR Stadion Jatidiri, 7) Manajemen Konstruksi Renovasi GOR Jatidiri, 8) Renovasi kolam renang Jatidiri, 9) Manajemen konstruksi , penyusunan review DED renovasi kolam renang Jatidiri, 10) renovasi venue sepatu roda Jatidiri, 11) Jasa Konsultasi Pengawasan renovasi fasilitas sepatu roda Jatidiri, 12) Pembangunan gedung dan fasilitas Cabor Tenis outdoor dan tribun, 13) Jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung dan fasilitas cabor tennis outdoor dan tribun, 14) Renovasi fasilitas lapangan tennis outdoor dan tribun, 15) Pembangunan Gym Center, 16) Pengawasan pembangunan gym center Jatidiri, , 17) Kursi tribun kawasan Olahraga Jatidiri, 18) Pembangunan lapangan volly pasir, 19)



Pengawasan pembangunan lapangan volly pasir, 20) Perencanaan gedung kantor bersama, 21) Pembangunan Sarpras pendukung, 22) Perencanaan DED Sarpras Pendukung Jatidiri, 23) Review DED Sarpras Pendukung Jatidiri, 24) Jasa Konsultasi pengawasan pembangunan sarpras pendukung Jatidiri.

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.13
Sub Fungsi : 2.13.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.13.01.0004.16	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	17.000.000.000	14.495.341.986	100%	85,27%	
2.13.01.0004.16.0001	Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata	2.850.000.000	2.265.841.603	100%	79,50%	Efisiensi perjalanan dinas, kegiatan Jateng On The Spot Borobudur Marathon bulan November 2019 banyak peserta yang mengundurkan diri (jumlah peserta tidak sesuai dengan target), serta ada beberapa DTW yang ternyata telah difasilitasi oleh Kabupaten / kota. Efisiensi kegiatan Fullboard Meeting Business to Business. Kegiatan Jateng On The Spot ke Karimunjawa diganti dengan Jateng On The Spot ke Pekalongan
2.13.01.0004.16.0002	Kegiatan Promosi Pariwisata di Dalam Negeri	8.050.000.000	6.663.023.692	100%	82,77%	Efisiensi Perjalanan dinas, efisiensi sewa panggung, tenda serta fasilitas kesenian untuk kegiatan dukungan event karena ada beberapa sewa yang telah dipenuhi oleh sponsor lain. Sisa negosiasi harga.
2.13.01.0004.16.0003	Kegiatan Promosi Pariwisata di Luar Negeri	500.000.000	403.704.690	100%	80,74%	Efisiensi Perjalanan dinas, sewa gedung dan sewa mobilitas darat untuk Business Meeting di Jepang, Moskow, Queensland tidak diambil, karena sudah difasilitasi oleh pihak penyelenggara expo dan kunjungan kerja.
2.13.01.0004.16.0004	Kegiatan Penyediaan media Promosi dan Informasi Pariwisata	5.300.000.000	4.969.448.891	100%	93,76%	Efisiensi Perjalanan dinas dan sewa mobilitas darat. Efisiensi pembuatan umbul-umbul, karena sedikitnya permintaan Fasilitas pembuatan umbul-umbul guna menyemarakkan suatu event.
2.13.01.0004.16.0005	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Informasi Pariwisata Jawa Tengah	300.000.000	193.323.110	100%	64,44%	Efisiensi Perjalanan dinas. Sisa negosiasi harga. Pemeliharaan jaringan yang semula dianggarkan terpisah, berdasarkan hasil negosiasi sudah dimasukkan dalam kontrak jasa konsultasi non konstruksi



Program pengembangan pemasaran pariwisata kegiatan pengembangan pasar wisata di tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu : 1) Jateng On The Spot sebanyak 10 kali selama tahun 2019 Bulan Februari 2019 di Surakarta, Karanganyar dan Sragen, daerah tujuan wisatanya yaitu Candi Ceto, Kebun Teh Kemuning, Atsiri, Colomadu, Heritage Palace, Museum Keris, Ndalem Gondosuli, Air Terjun Gumog, Makam Soeharto. Bulan April 2019 di Kabupaten Rembang, Pati, Kudus, daerah tujuan wisata Klenteng Cuan Kiong, Rumah Candu, Pantai Karang Jahe, Rumah Merah, Dua Kelinci, Agrowisata Jollong, Menara Kudus, Pabrik Djarum. Bulan Mei 2019 dukungan event di Kabupaten Magelang, daerah tujuan wisata Candi Borobudur, Candi Pawon, Desa Wisata Candirejo. Bulan Juni 2019 dukungan event di Surakarta dengan daerah tujuan wisata Pura Mangkunegaran dan Museum Keris. Bulan Juli 2019 dukungan event BIAPF Kabupaten Magelang dengan daerah tujuan wisata Hutan Pinus Kragilan, Ketep Pass, Museum BPK, Kebun Bibit Senopati. September 2019 dukungan event kota Semarang dan Batang dengan daerah tujuan wisata di Sam Poo Kong, Masjid Agung, Puri Agung Girinatha. Di bulan September 2019 juga ada Jateng On The spot di Banyumas, Cilacap dan Kebumen dengan daerah tujuan wisata di Desa wisata Karangsalam, Curug Telu, Goa Jatijajar, Teluk Penyus, Benteng Pendem. Bulan Oktober 2019 dukungan event di kota Semarang dengan daerah tujuan wisata Sam Poo Kong, Lawang Sewu. Di bulan November 2019 di event Borobudur Marathon Kabupaten Magelang, dengan daerah tujuan wisata Puthuk Setumbu, Gereja Ayam, Rafting, Desa Wisata Candirejo. Bulan Desember 2019 di Pekalongan, Tegal, Brebes dengan daerah tujuan wisata di Museum Batik Pekalongan, Pabrik Limun, PGS, Pulau Cemara, Hutan Mangrove Pandansari, Pantai Alam Indah, Guci. 2) penyusunan Nesprada. 3) Kegiatan Business to Business Meeting di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan (jumlah Seller 10, jumlah peserta seminar 87); Business to Business Meeting di Pontianak (jumlah seller 10, jumlah peserta seminar 97). 4) Penyusunan data kepariwisataan. 5) Analisis Efektifitas Event. 6) Rakor Pengembangan Pasar Wisata di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Desa Deroduwur Kabupaten Wonosobo.

Program pengembangan pemasaran pariwisata kegiatan promosi pariwisata di dalam negeri di tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : 1) Borobudur International Art and Performance Festival (BIAPF) Di Magelang, 2) Pesta Rakyat di Kabupaten Wonogiri, 3) Festival Karimunjawa di Jepara, 4) Festival Jamu dan Kuliner di Cilacap, 5) Borobudur Travel Mart and Expo (BTMX) di Semarang, 6) Partisipasi pameran promosi pariwisata di Luar Provinsi di Surabaya, Jakarta dan Bali, 7) Partisipasi pada Jateng Fair di Semarang, 8) Dukungan event di 109 kegiatan selama bulan Januari – Desember 2019.

Program pengembangan pemasaran pariwisata kegiatan promosi pariwisata di luar negeri telah mengikuti beberapa event yaitu : 1) Bulan Maret 2019 Tokyo Marathon di Jepang, 2) Bulan Juli 2019 kunjungan kerja Gubernur di Queensland Australia 3) Bulan Agustus 2019 Festival Indonesia di Moscow Rusia.



Program pengembangan pemasaran pariwisata kegiatan penyediaan media promosi dan informasi pariwisata di tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : 1) pembuatan bahan media cetak, cetak leaflet wonderful sebanyak 4000 lembar, cetak leaflet pesona sebanyak 4750 lembar, cetak leaflet bahasa Jepang sebanyak 3000 lembar

Program pengembangan pemasaran pariwisata kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi pariwisata Jawa Tengah di tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : 1) peningkatan kemampuan SDM pengelola TIC dengan daerah yang dikunjungi : Rawa Pening, Kasunanan Keraton Surakarta, PGS, Museum Purbakala Sangiran, Tawangmangu, House of Danar Hadi, The Heritage Palace, Kebun Raya Indrokilo. 2) Updating website pariwisata.

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.13
Sub Fungsi : 2.13.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
3.02.2.13.01.0005.17	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5.883.772.000	5.518.468.459	100%	93,79%	
2.13.01.0005.17.0001	Kegiatan Pengembangan SDM Pariwisata	1.628.000.000	1.481.514.260	100%	91,00%	Efisiensi Honorarium Pelaksana Kegiatan Honor Counterpart awalnya dianggarkan untuk 8 bulan tetapi selesai dalam waktu 6 bulan (Mei-Oktober), Efisiensi sewa kamar / akomodasi . Efisiensi Belanja makan mium peserta kegiatan dan perjalanan dinas luar daerah.
2.13.01.0005.17.0002	Kegiatan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif	2.250.000.000	2.193.805.019	100%	97,50%	
2.13.01.0005.17.0003	Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.005.772.000	1.843.149.180	100%	91,89%	efisiensi belanja perlengkapan, perjalanan dinas luar daerah. Efisiensi akomodasi narasumber pusat/nasional , karena narasumber tidak menginap.

Program pengembangan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif kegiatan pengembangan SDM pariwisata pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : 1) peningkatan mutu kompetensi SDM Pariwisata dengan melaksanakan : pembinaan pramuwisata dengan mengadakan pelatihan bahasa mandarin di Kota Semarang dan Kota Surakarta dengan jumlah



peserta masing-masing 25 pemandu wisata, pelatihan pemandu wisata minat khusus di Kabupaten Kebumen dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang Balawista, Peningkatan kualitas SDM Saka Pariwisata di Kabupaten Rembang dengan jumlah peserta 70 orang Saka Pariwisata, Pengawasan pramuwisata di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang. 2) Pembekalan dan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Pati dengan jumlah peserta masing-masing 40 orang pemandu wisata, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi pemandu wisata umum dan outbond melalui ujian sertifikasi untuk mendapatkan lisensi dari BNSP. 3) Penyusunan data base SDM pariwisata di Kota Semarang dengan peserta dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, output yang dihasilkan adalah Grand Desain Database SDM Pariwisata Jawa Tengah. 4) Pemilihan dan pemberdayaan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah di Kabupaten Boyolali dengan jumlah peserta 35 pasang Mas dan Mbak Duta Wisata dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, pemenang Mas dan Mbak Duta Wisata Tahun 2019 adalah Berlian Verlino dari Kota Salatiga sebagai Mas Duta Wisata Jawa Tengah Th 2019 dan Sri Rezeki dari Kabupaten Batang sebagai Mbak Duta Wisata Jawa Tengah Th 2019.

Program pengembangan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif kegiatan pengembangan SDM ekonomi kreatif pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : 1) Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif berupa pelatihan workshop dan artcamp di Kabupaten Pati, Purworejo, Cilacap, Pekalongan, Karanganyar, Wonogiri, Semarang, Temanggung, Magelang, Surakarta, dan Wonosobo dengan jumlah peserta sebanyak 586 orang pelaku ekonomi kreatif. 2) Pengembangan komunitas ekonomi kreatif di Jawa Tengah, Disporapar memberikan fasilitasi pada event pameran ekonomi kreatif dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang pelaku ekonomi kreatif di bidang fashion. 3) Sertifikasi kompetensi SDM Ekonomi Kreatif di Magelang, Tegal dan Pati, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif difasilitasi untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi kompetensi ekonomi kreatif. 3) Pendampingan sertifikasi HKI di Salatiga dengan jumlah peserta 50 orang pelaku ekonomi kreatif. Para pelaku ekonomi kreatif difasilitasi untuk dapat mengikuti sertifikasi HKI (mendaftarkan hak merek atau hak cipta). 4) Lomba kreasi ekonomi kreatif berupa lomba fotografi di Semarang. 5) Penyusunan profil usaha ekonomi kreatif Jawa Tengah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Program pengembangan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif kegiatan Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : 1) Peningkatan dan pengembangan kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif antar pemerintah / provinsi di Provinsi Bali, Jawa Barat dan kabupen/kota di Jawa Tengah. 2) Peningkatan dan pengembangan kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif antar pelaku pariwisata di Provinsi Banten dan kabupen/kota di Jawa Tengah. 3) Penguatan dan pengembangan / pendampingan kota kreatif dengan jumlah peserta 100 orang di Banyumas, Temanggung, dan Sukoharjo. 4) dialog pariwisata dan ekonomi kreatif dengan jumlah peserta 100 orang di Solo, Salatiga dan Karimunjawa. 5) Apresiasi dan konvensi



Pokdarwis (lomba, pameran, konvensi, dan temu mitra) diikuti 30 pokdarwis dari kabupen/kota di Jawa Tengah. 6) Pembinaan dan pembentukan kelompok sadar wisata. 7) Peningkatan pelayanan prima sebagai front liner kepariwisataan dan pokdarwis. 8) Penguatan kelembagaan dan pembentukan klaster pariwisata Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Borobudur-Dieng dan DPP Solo Sangiran. 9) Temu mitra klaster Pariwisata dan Pokdarwis dengan pelaku usaha pariwisata. 10) Sosialisasi Kelembagaan dan pengetahuan pada Kelompok Sadar Wisata di 11 titik yaitu Jepara (4 titik), Banyumas, Salatiga dengan jumlah peserta 1100 orang.

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Permasalahan dalam pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum Optimalnya Penerapan IPTEK olahraga dalam proses pembibitan, pemanduan dan pembinaan prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar.
- 2) Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder baik instansi pemerintah, lembaga olahraga, maupun dunia usaha.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar yang ditetapkan..

Permasalahan dalam pembangunan sektor pariwisata di Jawa Tengah antara lain:

- 1) Belum optimalnya sebaran wisatawan ke Jawa Tengah.
- 2) Belum optimalnya sarana prasarana pemasaran pariwisata belum sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 3) Belum sinerginya pembangunan destinasi pariwisata ;
- 4) Kurang optimalnya kualitas daya tarik wisata di destinasi pariwisata ;
- 5) Belum optimalnya kualitas usaha pariwisata yang berdaya saing di bidang pariwisata.
- 6) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pariwisata yang berkompeten;
- 7) Belum optimalnya pemahaman kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan di destinasi pariwisata ;
- 8) Kurangnya pengembangan inovasi dan kreatifitas masyarakat lokal terhadap produk UMKM sektor pariwisata.
- 9) Kurang optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.
- 10) Belum sinerginya kerjasama/kemitraan antar pelaku (pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat) dalam pembangunan kepariwisataan.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah *basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.*

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar



dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (*cash basis*) dengan metode penilaian atas dasar akrual (*accrual basis*).
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- e. Seluruh kekayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah per 1 Januari 2016 ;
- f. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptual*).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi, kesalahan interprestasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (*adjustment*) ke tahun buku berikutnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2016, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di syahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;



- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 POS-POS PENDAPATAN

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.637.116.934,00 atau 94,18% dari target Rp 2.800.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.795.786.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	Rp 2.800.000.000,00	Rp 2.627.251.934,00	94,18	Rp 2.795.786.375,00
Pendapatan Transfer				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah				
Jumlah	Rp 2.800.000.000,00	Rp 2.627.251.934,00	94,18	Rp 2.795.786.375,00

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.637.116.934,00 atau 94,18% dari target Rp 2.800.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.795.786.375,00

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 2.800.000.000,00	Rp 2.627.251.934,00	93,83%	Rp 2.794.036.375,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		Rp 9.865.000,00		Rp 1.750.000,00
Jumlah	Rp 2.800.000.000,00	Rp 2.637.116.934,00	94,18%	Rp 2.795.786.375,00

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 Rp 2.627.251.934,00 atau 93,83 % dari target Rp 2.800.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.794.036.375,00:

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Jasa Usaha	Rp 2.800.000.000,00	Rp 2.627.251.934,00	93,83%	Rp 2.794.036.375,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
Jumlah	Rp 2.285.300.000,00	Rp 2.627.251.934,00	93,83%	Rp 2.794.036.375,00

5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.627.251.934,00 atau 93,83 % dari target Rp 2.800.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.794.036.375,00:

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rp 488.070.000,00	Rp 411.701.000,00	84,35	Rp 691.145.800,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	Rp 418.000.000,00	Rp 397.658.384,00	95,13	Rp 373.283.200,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	Rp 1.199.750.000,00	Rp 1.083.641.000,00	90,32	Rp 1.128.475.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 694.180.000,00	Rp 734.251.550,00	105,77	Rp 601.132.375,00
Jumlah	Rp 2.800.000.000,00	Rp 2.627.251.934,00	93,83	Rp 2.794.036.375,00



5.1.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 9.865.000,00 untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.750.000,00 perincian sebagai berikut:

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				
Tuntutan Ganti Rugi				
Pendapatan Denda keterlambatan				
Pendapatan Denda Pajak				
Pendapatan Denda Retribusi				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda				
Pendapatan dari Pengembalian				
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
Penerimaan dari BLUD				
Penerimaan Lain-Lain		Rp 9.865.000,00		Rp 1.750.000,00
Jumlah		Rp 9.865.000,00		Rp 1.750.000,00

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 165.466.339.350,00 atau 83,03 % dari anggaran Rp 199.294.288.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 155.329.252.010,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp 53.242.276.000,00	Rp 44.972.139.938,00	84,47	Rp 44.927.045.126,00
Belanja Barang & Jasa	Rp 146.052.012.000,00	Rp 120.494.199.412,00	91,76	Rp 110.402.206.884,00
Jumlah	Rp 199.294.288.000,00	Rp 165.466.339.350,00	83,03	Rp 155.329.252.010,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 44.972.139.938,00 atau 84,47 % dari anggaran Rp 53.242.276.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 44.927.045.126,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp 34.574.581.000,00	Rp 28.414.285.070,00	82,18	Rp 30.032.422.358,00
Belanja Pegawai langsung	Rp 18.667.695.000,00	Rp 16.557.854.868,00	88,70	Rp 14.894.622.768,00
Jumlah	Rp 53.242.276.000,00	Rp 44.972.139.938,00	84,47	Rp 44.927.045.126,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 120.494.199.412,00 atau 82,50 % dari anggaran Rp 146,052.012.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 110.402.206.884,00 dengan rincian sebagai berikut :



	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	16.637.543.000,00	15.129.106.764,00	90,93%	6.712.869.400,00
Belanja Bahan/Material	1.054.952.000,00	926.956.300,00	87,87%	660.430.300,00
Belanja Jasa Kantor	33.341.620.000,00	28.666.317.752,00	85,98%	26.655.901.047,00
Belanja Premi Asuransi	679.425.000,00	394.809.363,00	58,11%	657.521.627,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	675.818.000,00	573.001.412,00	84,79%	472.251.391,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.903.990.000,00	1.673.697.660,00	87,90%	1.466.991.315,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	14.622.220.000,00	12.461.291.162,00	85,22%	19.112.852.594,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.798.900.000,00	3.022.226.250,00	79,56%	2.569.484.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.044.225.000,00	7.822.646.000,00	86,49%	6.098.041.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	15.928.391.000,00	14.019.961.253,00	88,02%	10.889.473.820,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	165.250.000,00	165.070.000,00	99,89%	112.500.000,00
Belanja Pakaian Kerja	12.240.000,00	12.240.000,00	100,00%	91.950.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.959.240.000,00	3.638.544.700,00	91,90%	2.743.221.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	31.344.927.000,00	20.743.483.333,00	66,18%	12.318.401.660,00
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	428.100.000,00	127.450.000,00	29,77%	219.725.000,00
Belanja Pemeliharaan	2.496.982.000,00	1.735.587.513,00	69,51%	1.918.741.200,00
Belanja Jasa Konsultasi	2.433.364.000,00	2.188.463.950,00	89,94%	634.229.080,00
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	750.000.000,00	738.350.000,00	98,45%	0,00
Belanja Bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat	539.400.000,00	537.501.000,00	99,65%	440.284.350,00
Belanja Hadiah barang	658.705.000,00	627.975.000,00	95,33%	974.162.600,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.576.720.000,00	5.289.520.000,00	94,85%	15.653.175.000,00
Jumlah	146.052.012.000,00	120.494.199.412,00	82,50%	110.402.206.884,00

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 363.923.515.191,00 atau 97,41 % dari anggaran Rp 373.596.008.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 151.068.487.711,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 3.403.985.000,00	Rp 3.238.337.941,00	95,13	Rp 1.582.183.139,00
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 369.347.223.000,00	Rp 359.908.106.250,00	97,44	Rp 149.148.322.572,00
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	Rp 730.000.000,00	Rp 727.971.000,00	99,72	Rp 288.530.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 114.800.000,00	Rp 49.100.000,00	42,77	Rp 49.452.000,00
Jumlah	Rp 373.596.008.000,00	Rp 363.923.515.191,00	97,41	Rp 151.068.487.711



5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 3.238.337.941,00 atau 95,13 % dari anggaran Rp 3.403.985.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.582.183.139,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Angkut	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp 776.528.000,00	Rp 688.298.787,00	88.63	Rp 699.123.199,00
Belanja Alat-alat Studio dan komunikasi	Rp 1.258.120.000,00	Rp 1.191.829.994,00	94.73	Rp 42.420.000,00
Belanja Alat-alat Kesehatan	-	-	-	Rp 197.725.000,00
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Peralatan Komputer	Rp 1.369.337.000,00	Rp 1.358.209.160,00	99.18	Rp 642.914.940,00
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
Jumlah	Rp 3.403.985.000,00	Rp 3.238.337.941,00	95,13	Rp1.582.183.139,00

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 359.908.106.250,00 atau 97.44% dari anggaran Rp 369.347.223.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 149.148.322.572,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	Rp 369.347.223.000,00	Rp 359.908.106.250,00	97,44	Rp 149.148.322.572,00
Belanja Monumen	-	-	-	-
Jumlah	Rp 369.347.223.000,00	Rp 359.908.106.250,00	97.44	Rp 149.148.322.572,00

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 727.971.000,00 atau 99,72 % dari anggaran Rp 730.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 288.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019		%	2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	Rp 730.000.000,00	Rp 727.971.000,00	99,72	Rp 288.530.000,00
Jumlah	730.000.000,00	727.971.000	99.72	288.530.000



5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 49.452.000,00 atau 96,51 % dari anggaran Rp 51.240.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut

:

	2019		%	2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	Rp 64.800.000,00	-	0	Rp 49.452.000,00
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	-
Pengadaan Alat Olahraga	Rp 50.000.000,00	Rp 49.100.000,00	-	
Jumlah	Rp 114.800.000,00	Rp 49.100.000,00	42,77	Rp 49.452.000,00,

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SILPA Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp 526.752.737.607,00) sedangkan Tahun 2018 sebesar (Rp 303.598.953.346,00)



5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp 795.386.216.971,06 naik sebesar Rp 359.701.128.502,57 atau 82,56 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 435.685.088.468,49

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.075.008.500,39 naik sebesar Rp 923.097.839,28 atau 607,66 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 151.910.661,11,00

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,- saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
Jumlah	0	0

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2019.

NO	URAIAN	2019	2018
1	Kas di BPP Balai Pasporapar	0	0
2			
	Jumlah	0	0

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

NO	URAIAN	2019	2018
1	-	-	-
2			
	Jumlah	-	-



Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2019 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	2019	2018
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2019.

NO	URAIAN	2019	2018
1	Pendapatan Retribusi Penerimaan Kekayaan Daerah	0	0
2			
	Jumlah	0	0



Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

NO	URAIAN	2019	2018
1	-	-	-
2			
	Jumlah	-	-

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2019 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2019 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan sewa gedung dibayar dimuka. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp 331.117.100,39 turun sebesar Rp 180.040.439,28 atau 119,17% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 151.076.661,11 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Asuransi BMD	236.376.663,23	151.076.661,11
Sewa dibayar dimuka	94.740.437,16	
Sewa		
Jumlah	331.117.100,39	159.833.332,00

5.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2019, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 743.891.400,00 naik



sebesar Rp 743.057.400,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 834.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Persediaan Bahan	5.541.400	834.000
Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Persediaan Obat-Obatan	0	-
Persediaan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	738.350.000,00	0
Persediaan Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
Persediaan Natura dan Pakan	0	-
Jumlah	743.891.400	834.000

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp 829.991.075.876,00 naik sebesar Rp 368.050.891.916,00 atau 79,68% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 461.940.183.960,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp 461.940.183.960,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 363.923.515.191,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 188.400.000,00
Hibah	Rp -
Mutasi Masuk	Rp -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 279.929.028.054,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp -
Koreksi	Rp 5.591.906.275,00
Jumlah tambah	Rp 649.632.849.520,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp 148.697.990,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 279.929.028.054,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 1.254.656.560,00
Mutasi Keluar	Rp -
Koreksi	Rp 249.575.000,00
Jumlah pengurangan	Rp 281.581.957.604,00
Grand Total	Rp 829.991.075.876,00

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 71.777.201.000,00 saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 71.578.531.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Tanah	71.777.201.000	198.670.000	0	71.578.531.000
Jumlah	71.777.201.000	198.670.000	0	71.578.531.000



Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	71.578.531.000,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	
Belanja Barang/Jasa	Rp	
Hibah	Rp	
Mutasi Masuk	Rp	
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	198.670.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	198.670.000,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	-
Grand Total	Rp	71.777.201.000,00

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp 35.280.899.811,00 naik sebesar Rp 15.260.187.441,00 atau 74% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 20.620.712.370,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Alat Berat	3.001.745.000		231.000.000	3.232.745.000
Alat Angkut	3.821.227.489	-	-	3.821.221.489
Alat Bengkel dan Ukur	45.300.000			45.300.000
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.716.787.938	11.738.443.821	219.275.000	8.197.619.117
Alat Studio dan Komunikasi	2.352.827.678	1.227.679.994	802.197.494	1.927.345.178
Alat Kedokteran	9.600.000	9.600.000		
Peralatan Olahraga	1.861.171.000	1.728.153.990	27.507.990	160.525.000
Alat komputer	4.472.240.706	1.374.509.160	138.219.040	3.235.950.586
Jumlah	35.280.899.811	16.078.386.965	1.418.199.524	20.620.712.370

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	20.620.712.370,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	3.238.337.941,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	138.500.000,00
Hibah	Rp	
Mutasi Masuk	Rp	
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	12.701.549.024,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah Penambahan	Rp	16.078.386.965,00



Berkurang

Ekstrakontable	Rp	148.697.990,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	904.954.034,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	353.472.500,00
Mutasi Keluar	Rp	
Koreksi	Rp	11.075.000,00
Jumlah	Rp	1.418.199.524,00
Grand Total	Rp	35.280.899.811,00

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 224.166.810.779,00 naik sebesar Rp 91.852.185.555,00 (69,42 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 132.314.625.224,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Gedung	218.908.357.368	367.341.403.085	276.569.913.530	128.136.867.813
Monumen	3.457.129.820			3.457.129.820
Bangunan Menara	57.678.000			57.678.000
Tugu Titik Kontrol	1.743.645.591	1.080.696.000		662.949.591
Jumlah	224.166.810.779	368.422.099.085	276.569.913.530	132.314.625.224

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	132.314.625.224,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	359.908.106.250,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	
Hibah	Rp	
Mutasi Masuk	Rp	
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	2.922.086.560,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	5.591.906.275,00
Jumlah Penambahan	Rp	368.422.099.085,00

Berkurang

Ekstrakontable	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	275.478.729.470,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	901.184.060,00
Mutasi Keluar	Rp	
Koreksi	Rp	190.000.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	276.569.913.530,00
Grand Total	Rp	224.166.810.779,00

5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.698.384.541 saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.970.413.541,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Jalan dan Jembatan	817.042.818	49.900.000	49.900.000	817.042.818
Bangunan Air/Irigasi	1.042.601.091	727.971.000	0	314.630.091
Instalasi	225.454.455	0	0	225.454.455
Jaringan	613.286.177	0	0	613.286.177
Jumlah	2.698.384.541	777.871.000	49.900.000	1.970.413.541



Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 1.970.413.541,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 727.971.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 49.900.000,00
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 777.871.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 49.900.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 49.900.000,00
Grand Total	Rp 2.698.384.541,00

5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.969.481.490,00 naik sebesar Rp saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.969.481.490,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Buku Perpustakaan	237.609.500			237.609.500
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	1.731.871.990	68.300.000	68.300.000	1.731.871.990
Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	1.969.481.490	68.300.000	68.300.000	1.969.481.490

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 1.969.481.490,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 49.100.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 19.200.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah penambahan	Rp 68.300.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 68.300.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah pengurangan	Rp 68.300.000,00
Grand Total	Rp 1.969.481.490,00



5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 495.733.952.245,00 saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 233.486.420.335,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 233.486.420.335,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 264.087.522.470,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 264.087.522.470,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 1.791.490.560,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp 48.500.000,00
Jumlah	Rp 1.839.990.560,00
Grand Total	Rp 495.733.952.245,00

Daftar konstruksi dalam pengerjaan (terlampir)

5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 41.429.790.928,13 naik sebesar sebesar Rp 11.794.497.775,51 atau 39.80% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 29.635.293.152,62 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Alat Besar	1.985.742.000,00	1.697.523.875,00
Alat Angkut	3.065.923.826,25	2.800.683.932,38
Alat Bengkel	18.120.000,00	13.590.000,00
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.809.737.760,3	9.267.208.058,00
Alat Studio dan Komunikasi	1.897.125.878,00	1.676.403.726,60
Alat Kedokteran	1.920.000,00	-
Alat Laboratorium	-	-
Alat Keamanan	-	-
Gedung	18.972.242.457,28	13.726.350.438,84
Monumen	294.338.489,37	189.494.288,26
Jalan dan Jembatan	225.102.987,20	166.336.865,40
Bangunan Air dan Irigasi	53.185.942,43	14.218.065,16
Instalasi	31.279.994,00	23.764.845,50
Jaringan	75.071.593,30	59.719.057,48
Jumlah	41.429.790.928,13	29.635.293.152,62



5.2.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.114.269.532,80 saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.228.287.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Aset Dikerjasamakan	2.944.850.000,00	2.944.850.000,00
	2.944.850.000,00	2.944.850.000,00
Aset Tak Berwujud	343.042.500,00	220.570.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(112.722.500,00)	(44.114.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	230.320.000,00	176.456.000,00
Barang Rusak Berat	11.218.646.884,00	10.317.462.824,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(10.279.547.351,20)	(10.210.481.824,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto	939.099.532,80	106.981.000,00
Jumlah Aset Lainnya	4.114.269.532,80	3.228.287.000,00

5.2.2. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 795.145.562.981,06 naik sebesar 358.065.474.512,57 atau 81,92% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar 437.080.088.468,49

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA 2019. Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.637.116.934,00 turun sebesar Rp 158.669.441,00 atau 5,68 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.795.786.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Pendapatan Asli daerah	Rp 2.627.251.934,00	Rp 2.794.036.375,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp 9.865.000,00	Rp 1.750.000,00
Jumlah	Rp 2.637.116.934,00	Rp 2.795.786.375,00

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.637.116.934,00 turun sebesar Rp 158.669.441,00 atau 5,68 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.795.786.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Pendapatan Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 2.627.251.934,00	Rp 2.794.036.375,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 9.865.000,00	Rp 1.750.000,00
Jumlah	Rp 2.637.116.934,00	Rp 2.795.786.375,00



Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.627.251.934,00 turun sebesar Rp 166.784.441,00 (5.97%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.794.036.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Retribusi Jasa Umum	-	-
Retribusi Jasa Usaha	Rp 2.627.251.934,00	Rp 2.794.036.375,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
Jumlah	Rp 2.627.251.934,00	Rp 2.794.036.375,00

5.3.1.1.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp 9.865.000,00 naik sebesar Rp 8.115.000,00 atau 463,71% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-
Pendapatan Bunga	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-
Penerimaan Lain-Lain	Rp 9.865.000,00	Rp 1.750.000,00
Jumlah	Rp 9.865.000,00	Rp 1.750.000,00

5.3.1.2 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp 9.865.000,00 naik sebesar Rp 8.115.000,00 atau 463,71% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.750.000,00

5.1.1. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp 174.077.077.936,93 naik sebesar Rp 10.468.175.233,51 atau 6.40 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 163.608.902.703,42



5.1.1.1 Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2019 sebesar Rp 174.077.077.936,93 naik sebesar Rp 10.468.175.233,51 atau 6,40 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 163.608.902.703,42

	2019	2018
Beban Pegawai	44.927.139.938,00	44.927.045.126,00
Beban Barang & Jasa	119.382.701.572,72	112.918.382.779,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.581.846.426,21	5.626.474.798,53
Beban Lainnya	140.390.000,00	137.000.000,00
Jumlah	174.077.077.936,93	163.608.902.703,42

5.1.1.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp 44.927.139.938,00 turun sebesar Rp 45.094.812,00 atau 1% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 44.927.045.126,00

	2019	2018
Beban Pegawai Tidak langsung	28.414.285.070,00	30.032.422.358,00
Beban Pegawai Langsung	16.557.854.868,00	14.894.622.768,00
Jumlah	44.927.139.938,00	44.927.045.126,00

5.1.1.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp 119.382.701.572,72 naik sebesar Rp 6.464.318.793,83 atau 57,24 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 112.918.382.779,00

	2019	2018
Beban Persediaan	20.495.185.364,00	14.023.123.024,00
Beban Jasa	75.486.342.950,72	83.745.581.153,89
Beban Pemeliharaan	2.120.188.925,00	2.390.992.591,00
Beban Perjalanan Dinas	20.743.483.333,00	12.318.401.660,00
Beban Hibah	0	440.284.350,00
Beban Bantuan Sosial	537.501.000,00	0
Jumlah	119.382.701.572,72	112.918.382.779,00

5.1.1.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp 9.874.358.926,21 naik sebesar Rp 4.247.884.127,68 atau 75,50 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.626.474.798,53

	2019	2018
Beban Penyusutan Aset Tetap	9.784.750.143,01	5.577.419.298,53
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	68.608.500,00	44.114.000,00
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	21.000.283,20	4.941.500
Jumlah	9.874.358.926,21	5.626.474.798,53

5.1.1.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp 140.390.000,00 turun sebesar Rp 3.390.000,00 atau 2,5 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 137.000.000,00



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan gabungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan olahraga dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah

6.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Disporapar sebagai berikut:

6.1.1. Tugas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

6.1.2. Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

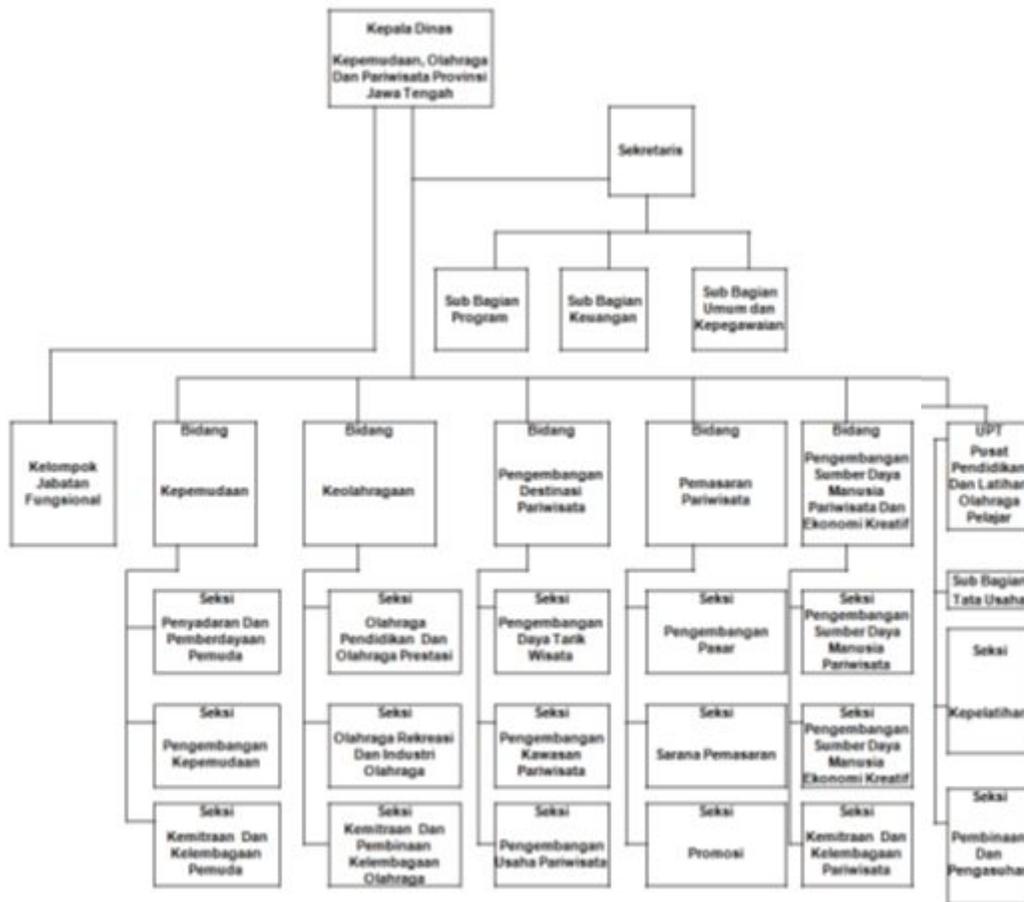
- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan



- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Susunan dan Struktur Organisasi DISPORAPAR

Berikut adalah struktur organisasi DISPORAPAR sesuai Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah:



2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

2.2.1. Sumber Daya Kepegawaian

Sumber Daya Kepegawaian Disporapar berdasarkan eselon, selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	II	1
2	III	6
3	IV	20
JUMLAH		27



Berdasarkan struktur organisasi Disporapar terdapat 28 jabatan struktural, jumlah tersebut terdiri dari Kepala Dinas pada eselon II; Sekretaris, Kepala Bidang Keolahragaan, Kepala Bidang Kepemudaan, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Kepala UPT Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar, pada eselon III; serta Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasie Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda, Kasie Pengembangan Kepemudaan, Kasie Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Kasie Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Kasie Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga, Kasie Pengembangan Daya Tarik Wisata, Kasie Pengembangan Kawasan Pariwisata, Kasie Pengembangan Usaha Pariwisata, Kasie Pengembangan Pasar, Kasie Sarana Pemasaran, Kasie Promosi, Kasie Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Kasie Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Kasie Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata, Kepala Seksi Tata Usaha, Kasie Kepelatihan, Kasie Pembinaan dan pengasuhan pada eselon IV.

Table 6.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	57
2	Bidang keolahragaan	27
3	Bidang Kepemudaan	22
4	Bidang Pemasaran Pariwisata	19
5	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	19
6	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	19
7	UPT Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	37
Jumlah		200

Table 6.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	28
2	Golongan III	103
3	Golongan II	65
4	Golongan I	4
Jumlah		200

6.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.4
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung kantor	3	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang
			Jl Pemuda No. 136 Semarang
			Jl. Pemuda No. 145 Semarang
2	Komplek Stadion	1	Komplek Stadion Jatidiri Semarang
3	Museum Olahraga Mrapen	1	Mrapen di Kab. Grobogan
4	Hotel	4	Hotel Karimunjawa Inn - Kab. Jepara
			Hotel Garuda Kopeng - Kab. Semarang
			Hotel Pondok Slamet - Kab. Banyumas
			Hotel Pringgosari - Kab. Karanganyar
5	Rest Area	1	Kabupaten Tegal



BAB VII

P E N U T U P

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2019.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2019 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun yang berakhir 31 Desember 2019, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap catatan atas laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.